

**“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara
Nomor 7 Tahun 2013 tentang
Peran Masyarakat dalam Bidang Pendidikan”**

Giandika Estri Sefrina, Sri Suwitri

**Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jl. Prof. Soedharto SH, Kampus Tembalang, Semarang

Email : estrigiandika@gmail.com

ABSTRACT

The implementation of Local Regulation Banjarnegara District Number 7 Year 2013 about Role of Society in Education Sector aims to improve the quality of education in Banjarnegara district. There are still problems that occur in education in Banjarnegara district which cannot be separated from the role of the community as the provision of educational resources, the implementation of educational units, and the use of educational outcomes.

The purpose of this study is to describe and analyze the implementation of Local Regulation Banjarnegara District Number 7 Year 2013 about Role of Society in Education Sector, and to identify the supporting and inhibiting factors for the implementation of Local Regulation Banjarnegara District Number 7 Year 2013 about Role of Society in Education Sector.

The researcher used an implementation model that researcher compiled with a Top-Down approach based on the Van Meter Van Horn theory, Merile S. Grindle, and Daniel Mazmanian and Paul A. Sabatier. The factors that researcher use in discussing the implementation of the regional regulations studied are standards and policy targets, resources, communication between organizations, as well as social, economic, political conditions.

The results showed that the implementation of Local Regulation Banjarnegara District Number 7 Year 2013 was not optimal due to the influence of the factors of lack of clarity on standards and targets for regional regulations, lack of human resources, and facilities and economic, social, and political factors of Banjarnegara society. Suggestions that researchers provide are by increasing teacher competence, fulfilling educational facilities and infrastructure, conducting socialization in schools to increase awareness of education, and optimizing Operational Assistance School.

Keywords : *implementation, local regulation Banjarnegara district, education, society*

1. PENDAHULUAN

Kabupaten Banjarnegara mengesahkan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2013 tentang Peran Masyarakat Dalam Bidang Pendidikan, dimana dalam Perda tersebut berisi beberapa hal sebagai berikut :

- a. Ruang lingkup peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- b. Fungsi peran serta masyarakat;
- c. Akses informasi untuk menjamin terlaksananya peran serta masyarakat dalam pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan;
- d. Peran dan fungsi Dewan Pendidikan serta Komite Sekolah/Madrasah;
- e. Keanggotaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah;
- f. Regulasi dan prosedur penyusunan kebijakan pendidikan di Daerah.

Ketentuan yang mengatur tentang peran masyarakat dalam pendidikan pada Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara tersebut dijabarkan pada pasal 4 yang berbunyi:

Peran masyarakat dapat menjadi sumber, pelaksana dan pengguna hasil pendidikan dalam bentuk:

- a. Penyediaan sumber daya pendidikan;
- b. Penyelenggaraan satuan pendidikan;
- c. Penggunaan hasil pendidikan;
- d. Pengawasan penyelenggaraan pendidikan;
- e. Pengawasan pengelolaan pendidikan;
- f. Pemberian pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berdampak pada pemangku kepentingan pendidikan pada umumnya; dan/atau
- g. Pemberian bantuan atau fasilitas kepada satuan pendidikan dalam menjalankan fungsinya.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2013 tentang Peran Masyarakat di Bidang Pendidikan di Kabupaten Banjarnegara?
- b. Apa faktor pendukung dan penghambat implementasi Peraturan Daerah Kabupaten

Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Peran Masyarakat di Bidang Pendidikan?

2. KERANGKA TEORI

2.1 Implementasi Kebijakan

Publik

Menurut Van Meter dan Van Horn, Merille S. Grindle dan Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya.

2.2 Model Implementasi Van

Meter dan Van Horn

Van Meter dan Van Horn dalam Deddy Mulyadi (2015:72-73) menjelaskan bahwa ada 6 variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

- a) Standar dan sasaran kebijakan
Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur, sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang dapat menyebabkan

terjadinya konflik diantara para agen implementasi.

- b) Sumber daya
Kebijakan perlu didukung oleh sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun sumber daya non manusia.
- c) Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas
Dalam berbagai kasus, implementasi sebuah program terkadang perlu didukung dan dikoordinasikan dengan instansi lain agar tercapai keberhasilan yang diinginkan.
- d) Karakteristik agen pelaksana
Sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan. Termasuk di dalamnya karakteristik para partisipan yakni mendukung atau menolak, kemudian juga bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.
- e) Kondisi sosial, ekonomi, politik
Kondisi sosial, ekonomi, politik mencakup sumber daya ekonomi

lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan.

- f) Disposisi implementor
- Disposisi implementor mencakup tiga hal penting, yaitu:
- Respons implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan;
 - Kognisi, yakni pemahamannya terhadap kebijakan;
 - Intensitas disposisi implementor yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

2.3 Model Implementasi Merille S. Grindle

Keberhasilan implementasi menurut Merille S. Grindle dalam Deddy Mulyadi (2015:66-67) dipengaruhi oleh isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan kebijakan (*content of implementation*). Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, barulah implementasi kebijakan dilakukan

2.4 Model Implementasi Daniel

Mazmanian & Paul Sabatier

Mazmanian dan Sabatier dalam Deddy Mulyadi (2015:70-71) menjelaskan bahwa ada tiga kelompok variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni:

- Karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*)
- Karakteristik kebijakan / Undang-undang (*ability of statute to structure implementation*)
- Variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementations*)

3. METODE PENELITIAN

Pada penelitian Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Peran Masyarakat dalam Bidang Pendidikan, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan dari perilaku yang dapat diamati berupa pengamatan wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan oleh manusia dalam mengamati suatu fenomena tertentu.

Pada penelitian ini memiliki informan yaitu : Pegawai Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Dewan Pendidikan, Komite Sekolah di SD N 1 Bawang, SD N 3 Kesenet, SMK N 2 Bawang, Kabupaten Banjarnegara.

Peneliti menggunakan kedua sumber data, yaitu: sumber data primer dan sumber data sekunder guna memenuhi kebutuhan penelitian Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Peran Masyarakat.

Model analisis data kualitatif terdapat tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu Kondensasi Data; Penyajian Data; Penarikan Kesimpulan. (Miles dan Huberman, 2012:246)

4. PEMBAHASAN

4.1 Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara No.7 Tahun 2013 tentang Peran Masyarakat dalam Bidang Pendidikan

Peran masyarakat dalam bidang pendidikan berfungsi ikut memperbaiki dan meningkatkan

akses, mutu, daya saing, relevansi, tata kelola, dan akuntabilitas pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan. Bentuk Peran Masyarakat telah dijelaskan pada Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara No.7 Tahun 2013 tentang Peran Masyarakat Dalam Bidang Pendidikan pada pasal 4.

Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa peran masyarakat dalam bidang pendidikan di Kabupaten Banjarnegara masih rendah. Hal ini ditandai oleh beberapa temuan yang ada dilapangan antara lain:

- Penyediaan Sumber Daya Pendidikan : Masyarakat sebagai penyedia sumber daya pendidikan di Kabupaten Banjarnegara masih belum maksimal. Partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan masih jauh dibawah standar dan animo masyarakat masih rendah. Hal ini ditandai oleh beberapa faktor yaitu Tingkat pendidikan masyarakat yang rendah menjadikan partisipasi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan juga rendah; Tingkat perekonomian

masyarakat yang masih berada dibawah garis kemiskinan membuat orang tua siswa tidak mampu mengakomodir biaya sekolah anak untuk sehari-hari (uang saku dan uang transport). Bahkan biaya operasional sekolah (uang saku dan uang transport) masih lebih tinggi dibandingkan dengan pendapatan orang tua; Masih adanya anak putus sekolah di Kabupaten Banjarnegara membuat peran masyarakat di bidang pendidikan jauh dari kata maksimal.

- Bentuk peran masyarakat dalam bidang pendidikan salah satunya sebagai penyelenggaraan pendidikan. Bentuk peran masyarakat tersebut dinilai masih rendah ditandai dengan : Sarana dan Prasarana pendidikan yang belum terpenuhi dan terdapat kesenjangan sarana dan prasarana yang ada disekolah wilayah perkotaan dengan sekolah-sekolah yang ada di wilayah pedesaan yang jaraknya jauh dengan pusat kota Kabupaten Banjarnegara. Sarana dan prasarana tersebut meliputi kondisi gedung sekolah

dengan kondisi yang masih terdapat kerusakan, kondisi meubelair di sekolah banyak yang rusak, masih kurangnya sarana dan prasarana peningkatan mutu sekolah seperti gedung perpustakaan yang belum memiliki buku-buku secara lengkap, dan minimnya alat peraga. Selain itu Persebaran guru PNS yang tidak merata. Guru PNS sebagian besar berada di sekolah wilayah perkotaan sedangkan di wilayah pedesaan guru PNS lebih sedikit.

- Penggunaan Hasil Pendidikan, Bentuk peran masyarakat dalam bidang pendidikan juga sebagai penggunaan hasil pendidikan. Namun pada kenyataannya bentuk peran tersebut masih jauh dari kata maksimal, ditandai oleh: Rendahnya mutu lulusan. Rata-rata masyarakat Kabupaten Banjarnegara hanya menyelesaikan pendidikan di Sekolah Dasar saja. Selain itu menurut Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banjarnegara ditahun yang sama juga menilai bahwa

rendahnya mutu lulusan yang dilihat dari rata-rata Ujian Nasional. Rata-rata UN SD/MI masih rendah karena hanya mencapai angka sebesar 7,76 dari target 7,83. Pada jenjang SMP/MTs juga belum memenuhi target yang ditetapkan 7,5 dengan realisasi hanya sebesar 5,44. Sedangkan pada jenjang SMA/MA dan SMK terealisasi sebesar 8,58 dan 8,27.

Berdasarkan Perda Kabupaten Banjarnegara No.7 tahun 2013 tentang Peran Masyarakat dalam Bidang Pendidikan bahwa Dewan Pendidikan memiliki beberapa fungsi dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga mandiri. Pada implementasinya fungsi Dewan Pendidikan sudah berjalan, namun belum sesuai dengan target. Hal ini dikarenakan adanya beberapa fungsi yang belum berjalan sesuai dengan Perda tersebut. Adapun fungsi Dewan Pendidikan yang belum berjalan semestinya, antara lain:

- 1) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu; masih

banyak masyarakat yang kurang mengetahui fungsi dari Dewan Pendidikan sehingga pada fungsi ini belum bisa terlaksana dengan maksimal.

- 2) Menampung dan menganalisis aspirasi masyarakat, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat; fungsi tersebut belum bisa dilaksanakan dengan optimal dikarenakan Dewan Pendidikan tidak mampu menampung aspirasi masyarakat secara menyeluruh ataupun jika aspirasi tersebut terwakilkan belum ada media yang efektif untuk bisa disampaikan kepada Dewan Pendidikan. Hal ini juga dipengaruhi oleh beberapa masyarakat yang masih kurang kooperatif yang belum bisa ikut andil dalam penyelenggaraan pendidikan.

Permasalahan lainnya mengenai kesadaran masyarakat akan peran dan fungsi Komite Sekolah masih rendah. Kondisi umum di lapangan Komite Sekolah masih dipersepsikan sebagai lembaga sekolah yang fungsinya terbatas pada

pengumpulan dana pendidikan dari orang tua siswa saja. Selain itu Komite Sekolah dianggap memiliki tugas dan fungsi yang sama seperti Kepala Sekolah, serta pembentukan Komite Sekolah yang hanya ditunjuk oleh Kepala Sekolah menjadikan antusias masyarakat terhadap Komite Sekolah rendah menjadikan Komite Sekolah tidak berfungsi sebagaimana mestinya yaitu pemberi pertimbangan, penghubung antara orang tua dan sekolah, mengawasi penyelenggaraan pendidikan.

4.2 Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara No.7 Tahun 2013 tentang Peran Masyarakat dalam Bidang Pendidikan

4.2.1 Standar dan Sasaran Kebijakan

Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara No.7 Tahun 2013 tentang Peran Masyarakat dalam Bidang Pendidikan menunjukkan masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan kesadaran masyarakat yang masih kurang terhadap pentingnya pendidikan, dan belum ada

pemikiran maju yang datang dari masyarakat bahwa pendidikan yang baik diciptakan oleh masyarakatnya yang maju, demikian pula sebaliknya masyarakat yang maju mampu menciptakan pendidikan yang baik.

Standarisasi implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara No.7 Tahun 2013 tentang Peran Masyarakat dalam Bidang Pendidikan tidak ditentukan secara jelas, sehingga masyarakat kurang menyadari fungsi dan peran Perda tersebut. Sosialisasi mengenai Perda tersebut dirasa kurang mampu menyentuh masyarakat secara mendalam, hal ini dibuktikan sebagian masyarakat di Banjarnegara masih pasif terhadap proses penyelenggaraan pendidikan. Hal tersebut berimplikasi pada standar nilai lulusan ujian nasional yang tidak memenuhi target.

4.2.2 Sumber Daya

Sumber daya manusia di Kabupaten Banjarnegara masih tergolong rendah, kurangnya tenaga pendidik yang berkompeten adalah penyebabnya, ditambah dengan kebijakan moratorium pada tahun 2014 yang dilakukan pemerintah

pusat berdampak pada penurunan kuantitas dan kualitas PNS dalam hal ini tenaga pendidik di Kabupaten Banjarnegara. Sehingga jumlah tenaga pendidik atau guru yang PNS sangat sedikit yang mengakibatkan kesenjangan sekolah di wilayah pedesaan dan sekolah di wilayah perkotaan

Untuk sumber daya dana, pihak Kabupaten Banjarnegara juga masih terkendala sumber daya dana yang ada untuk penyelenggaraan pendidikan. Dana pendidikan bersumber dari APBN, APBD Provinsi, APBD Kabupaten, kerjasama dengan BUMN atau BUMD, perusahaan yang serta dengan memberdayakan masyarakat. Namun itu semua belum cukup untuk penyelenggaraan pendidikan karena keterbatasan sumber daya dana.

Selain itu untuk kondisi infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara sebagian daerah sedang dalam tahap pembangunan dan beberapa daerah lainnya dalam tahap perbaikan jalan aspal.

Sedangkan untuk kondisi sarana dan prasarana yang menunjang untuk penyelenggaraan

pendidikan di Kabupaten Banjarnegara juga masih menjadi salah satu kendala. Pasalnya, meski bukan sebagai faktor utama dalam keberhasilan penyelenggaraan pendidikan, namun hal tersebut menjadi salah satu sebab belum setaranya kualitas pendidikan di daerah pedesaan terutama daerah terpencil dengan daerah perkotaan

Tentu kondisi demikian merupakan faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Peran Masyarakat dalam Bidang Pendidikan. Namun terdapat beberapa faktor pendukungnya, yaitu: Prestasi pelajar dari sekolah di wilayah pedesaan berhasil memperoleh prestasi tingkat nasional; Perbaikan infrastruktur jalan yang merupakan program pemerintah terus dilakukan untuk mendukung pendidikan.

4.2.3 Komunikasi Antar Badan Pelaksana

Agar terwujudnya implementasi Perda, seluruh agen implementasi dalam hal ini badan-badan yang terlibat harus saling

memiliki koordinasi yang baik supaya tujuan daripada Perda dapat tercapai. Namun pada kenyataannya, koordinasi antara badan pelaksana belum berjalan dengan optimal. Hal ini dapat ditandai dengan hal-hal berikut: Sebagian masyarakat masih belum mengetahui fungsi dari adanya Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah sehingga masyarakat tidak mampu menyampaikan aspirasinya mengenai pendidikan dan masyarakat tidak mengetahui media penyampaian;

Kurangnya keaktifan pihak Komite Sekolah terhadap rapat-rapat yang diakan bersama Dewan Pendidikan maupun Dindikpora guna membahas Standar Minimal Pendidikan, sarana dan prasarana sekolah, guna meningkatkan kualitas sekolah.

Dalam hal kejelasan, keseragaman, dan konsistensi penyampaian informasi antar badan pelaksana sudah cukup baik dan informasi yang diberikan sudah bisa diterima dengan baik, namun masih antusiasme masyarakatnya masih rendah karena tidak semua masyarakat atau orang tua tidak

semua hadir dalam kegiatan rapat sekolah, begitu pula Komite Sekolah yang tidak semua hadir dalam kegiatan rapat maupun sosialisasi dengan Dewan Pendidikan ataupun Dindikpora.

4.2.4 Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Faktor kondisi sosial, ekonomi, politik juga dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan atau suatu peraturan. Hal ini dapat diukur atau di klasifikasikan berdasarkan tingkat pendidikan, pekerjaan di Kabupaten Banjarnegara.

Namun pada kondisi sosial, ekonomi, politik ini menunjukkan bahwa Jumlah masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan yang ada di Kabupaten Banjarnegara masih tinggi; Masyarakat kurang mendukung anak untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Cara pandang masyarakat yang menganggap bahwa menempuh pendidikan hanya membuang waktu dan tidak menghasilkan uang untuk kehidupan sehari-hari; Keadaan masyarakat sekitar yang masih cenderung stagnan serta mayoritas

berprofesi sebagai petani dimana pendapatan yang didapat hanya bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Hasil pembahasan mengenai implementasi Perda Kabupaten Banjarnegara No.7 Tahun 2013 tentang Peran Masyarakat dalam Bidang Pendidikan dengan fakta-fakta yang ada di lapangan menunjukkan bahwa peran masyarakat Kabupaten Banjarnegara belum berjalan secara optimal. Kondisi implementasi Perda Kabupaten Banjarnegara No.7 Tahun 2013 tentang Peran Masyarakat dalam Bidang Pendidikan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- **Bentuk Peran Masyarakat**

Bentuk peran masyarakat dalam bidang pendidikan sesuai pasal 4 Perda Kabupaten Banjarnegara No.7 Tahun 2013 tentang Peran Masyarakat dalam Bidang Pendidikan dapat berupa sebagai penyediaan sumber daya pendidikan, penyelenggaraan satuan pendidikan, dan sebagai penggunaan hasil pendidikan. Peran masyarakat dalam bidang pendidikan di

Kabupaten Banjarnegara masih rendah.

- **Fungsi Dewan Pendidikan**

Fungsi Dewan Pendidikan sudah berjalan, namun belum sesuai dengan target. Hal ini dikarenakan adanya beberapa fungsi yang belum berjalan sesuai dengan Perda tersebut.

- **Fungsi Komite Sekolah**

Komite Sekolah sudah menjalankan fungsinya, namun belum berjalan dengan maksimal ditandai dengan permasalahan-permasalahan, antara lain: Pembentukan Komite Sekolah yang belum sesuai memiliki acuan formal;

Pemahaman masyarakat terhadap fungsi dan peran Komite Sekolah masih rendah; Antusiasme masyarakat terhadap Komite Sekolah juga rendah; Belum adanya evaluasi rutin terhadap Komite Sekolah.

- **Faktor Pendukung**

- a) **Sumber Daya : Sumber Daya Manusia** : Prestasi pelajar dari sekolah di wilayah perdesaan berhasil memperoleh prestasi tingkat nasional. Perbaikan

infrastruktur jalan yang merupakan program pemerintah sekarang terus dilakukan, ini merupakan usaha untuk mendukung pendidikan.

- b) Komunikasi Antar Badan Pelaksana: Dalam hal kejelasan, keseragaman, dan konsistensi penyampaian informasi antar badan pelaksana sudah cukup baik dan informasi yang diberikan sudah bisa diterima dengan baik.

- Faktor Penghambat

- a) Standar dan Sasaran Kebijakan: Standarisasi implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara No.7 Tahun 2013 tentang Peran Masyarakat dalam Bidang Pendidikan tidak ditentukan secara jelas; Kesadaran masyarakat yang masih kurang terhadap pentingnya pendidikan; Pelaksanaan Perda tersebut belum sesuai dengan sasaran yang diharapkan, hal ini ditandai

dengan masih adanya angka putus sekolah di Banjarnegara, kualitas lulusan yang masih rendah dilihat dari nilai Ujian Nasional, kualitas guru atau tenaga pendidik yang kurang berkompeten, kesenjangan sarana dan prasarana sekolah di sekolah wilayah perkotaan dengan sekolah di wilayah perdesaan.

- a) Sumber Daya : Sumber daya manusia untuk guru yang memenuhi kualifikasi (S1 dan PNS) dan berkompetensi di wilayah perdesaan masih kurang; Kurangnya sumber daya dana untuk penyelenggaraan pendidikan; Kurang meratanya kondisi infrastruktur di wilayah perdesaan, seperti jalan beraspal untuk akses mobilitas ke sekolah.; Kesenjangan sarana dan prasarana pendidikan di sekolah wilayah pedesaan dengan sekolah di wilayah perkotaan.

a) Komunikasi Antar Badan Pelaksana: Jumlah masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan yang ada di Kabupaten Banjarnegara masih tinggi: Masyarakat kurang mendukung anak untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Cara pandang masyarakat yang menganggap bahwa menempuh pendidikan hanya membuang waktu dan tidak menghasilkan uang untuk kehidupan sehari-hari; Keadaan masyarakat sekitar yang masih cenderung stagnan serta mayoritas berprofesi sebagai petani dimana pendapatan yang didapat hanya bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari menyebabkan kurangnya peran masyarakat dalam proses penyelenggaraan pendidikan di sekolah: Tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah juga mempengaruhi kesadaran

masyarakat untuk ikut terlibat dalam memajukan pendidikan di sekolah. Masyarakat cenderung pasif terhadap kegiatan-kegiatan yang melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan atau kebijakan sekolah.

5.2 Saran

- a) Diperlukan peningkatan kompetensi Guru di Kabupaten Banjarnegara melalui pelatihan-pelatihan yang terstruktur dalam pembelajaran agar menunjang pembelajaran kreatif dan menyenangkan bagi siswa;
- b) Pemenuhan sarana prasarana pendidikan yang layak dan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal dan Standar Nasional Pendidikan (SNP) secara merata di sekolah-sekolah perdesaan di Kabupaten Banjarnegara. Serta penambahan fasilitas tambahan seperti pengadaan perpustakaan dan penambahan buku di sekolah-sekolah yang belum lengkap di Kabupaten Banjarnegara;
- c) Melakukan sosialisasi-sosialisasi di Sekolah guna meningkatkan

kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan, dan mengingatkan bahwa pendidikan anak merupakan tanggung jawab bersama. Agar masyarakat menyadari pentingnya motivasi bagi anak untuk meningkatkan minat belajar dan meningkatkan kualitas siswa;

- d) Mengoptimalkan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) agar seluruh siswa dapat bersekolah dengan mengurangi pengeluaran biaya orang tua.

DAFTAR PUSTAKA

Mulyadi, Deddy. 2015. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik (Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik)*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Perda Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2013 tentang Peran Masyarakat dalam Bidang Pendidikan.